

TESIS

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN YANG DICERAIKAN
DILUAR PENGADILAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA
DAN PIDANA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh :
RISA PUTRI SINAGA
2220122061

KOMISI PEMBIMBING

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum
Dr. Yasniwati, S.H., M.H

Pembimbing I
Pembimbing II

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN YANG DICERAIKAN DI LUAR PENGADILAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN PIDANA

(Risa Putri Sinaga, 2220122061, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 194 Halaman, 2025)

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak perempuan yang diceraikan di luar pengadilan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, menggali data melalui studi dokumen dan dari wawancara langsung dengan perempuan yang diceraikan di luar mekanisme pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan masih terjadi, dengan alasan utama adalah ketidaktahuan mengenai prosedur perceraian di pengadilan, keterbatasan akses terhadap pengadilan, dan kendala ekonomi. Perceraian di luar pengadilan menimbulkan beberapa masalah hukum, khususnya terkait perlindungan hak perempuan. Masalah ini mencakup aspek perdata dan pidana, serta perlindungan hak perempuan berdasarkan perjanjian perkawinan yang dibuat notaris. Ketidakpastian hukum yang diakibatkan perceraian di luar pengadilan sangat merugikan perempuan. Status istri sah yang tetap melekat meskipun telah bercerai secara informal membuat perempuan tidak dapat menikah lagi secara sah dan mengancam tidak terpenuhinya hak-haknya yang lain. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembangunan legal infrastruktur yang memadai di daerah terpencil khususnya daerah Nagari Pasar tapan dan mengaktualisasikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses pengadilan. Saat ini keberlakuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak memuat ketegasan yang mengatur kriminalisasi atas penyimpangan hukum perkawinan, keadaan tersebut menjadi faktor yang menyumbang minimnya perlindungan hukum bagi perempuan yang diceraikan di luar pengadilan. Padahal pada tataran praktik, berdasarkan kasus yang dijadikan objek penelitian, perceraian kebanyakan terjadi karena pihak suami meninggalkan isteri secara sepihak dan pihak isteri hanya menerima saja. Dalam pembagian harta bersama, peneliti menemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan masih kuat memegang nilai-nilai kekeluargaan, di mana peran mamak menjadi penting dalam proses mediasi dan penyelesaian sengketa, termasuk pembagian harta. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa perlindungan hak perempuan yang diceraikan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui pembuatan perjanjian perkawinan yang sah, yang dibuat dan disahkan oleh notaris. Perjanjian perkawinan ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat, baik terkait dengan harta benda maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga. Dengan adanya perjanjian perkawinan, terutama dalam konteks perempuan yang diceraikan di luar pengadilan, perlindungan terhadap harta dan hak-hak perempuan dapat lebih jelas dan terjamin. Tesis ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum dan peningkatan infrastruktur untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dengan baik dalam proses perceraian, serta mempermudah perempuan mengakses pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Perempuan, Perceraian di Luar Pengadilan, Harta Bersama, Perjanjian Kawin

LEGAL PROTECTION FOR THE RIGHTS OF WOMAN WHO HAVE BEEN DIVORCED EXTRA-JUDICIALLY FROM THE PERSPECTIVES OF CIVIL AND CRIMINAL LAW

(Risa Putri Sinaga, 2220122061, Master of Notarial Law Program, Faculty of Law, Andalas University, 194 Pages, 2025)

ABSTRACT

This research aims to investigate the protection of women's rights in relation to Marriage after a non-court sanctioned divorce, specifically in Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. The study utilizes a qualitative approach with a juridical-empirical perspective, gathering data through document analysis and in-depth interviews with women who have experienced Extra-Judicial divorce. The findings indicate that the practice of extra-judicial divorce persists in Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, primarily driven by factors such as ignorance of legal divorce procedures, limited access to legal services, and economic constraints. This practice presents several legal challenges, particularly concerning the protection of women's rights, including the right to marriage after a non-court sanctioned divorce, the equitable division of shared assets following such divorces, and the protection of women's rights through notarized prenuptial agreements. Woman who has been divorced extra-judicially is still legally considered married to her first husband, which restricts her right to enter into a legally valid second marriage. This research highlights the importance of developing adequate legal infrastructure in remote areas, especially in the Nagari Pasar Tapan region, and actualizing legal aid for communities unable to access the court system. The current implementation of Law No. 1 of 1974 lacks clear provisions criminalizing violations of marriage law. This situation contributes to the inadequate legal protection for women who undergo extra-judicial divorce. In practice, based on the cases studied, divorces often occur because the husband unilaterally abandons the wife, and the wife simply accepts the situation. In the division of shared property, the researcher discovered that the community in Basa Ampek Balai Tapan District still holds strong family values, where the role of the 'mamak' (maternal aunt) is crucial in the mediation and resolution of disputes, including property division. Additionally, the research explains that the protection of women divorced outside the court can be achieved through the creation of a valid prenuptial agreement, made and notarized by a public notary. This prenuptial agreement serves to provide legal certainty for the parties involved, concerning both property and the rights and obligations of each party within the marriage. With a prenuptial agreement, especially in the context of women divorced outside the court, the protection of property and women's rights can be made clearer and more guaranteed. This thesis recommends legal reforms and infrastructure improvements to ensure that women's rights are well protected during the divorce process and to facilitate women's access to the court system.

Keywords: Women's Rights Protection, Extra-Judicial Divorce, Shared Assets, Prenuptial Agreement, Postnuptial Agreement